

PANDUAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA 2006

Buku Panduan Bantuan Hukum Terlengkap Untuk Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum Anda

Seluruh aspek kehidupan kita tak bisa dilepaskan dari hukum. Ia menjangkau kita sejak masih dalam kandungan, tumbuh dewasa, bekerja, beranak-pinak, bertetangga, sampai meninggal dunia. Ia ada setidaknya memenuhi ciri relasional minimal dua orang.

Hukum tentu tumbuh dan hidup sesuai dengan dinamika zaman. Di tengah masyarakat yang berkembang pesat sekarang, di mana teknologi informasi dan cara berbisnis makin modern, hukum kian kompleks, rumit dan menampakkan wujudnya jadi makin spesifik.

Buku *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* ini dibuat untuk membantu memahami dan menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Terdiri dari 16 bab yang diulas kontributor ahli di bidangnya.

Isinya amat komplit. Dari soal hak anak, lingkungan hidup, hak tersangka, sampai jaminan penyelesaian masalah buruh. Dari masalah kredit, perlindungan konsumen, hukum tanah, perumahan, hingga tentang pelanggaran hak asasi manusia. Diulas dengan pendekatan praktis yang tak melulu bicara soal teori-teori hukum. Penjelasannya sederhana dengan selingan teknik-teknik bagaimana seharusnya kita melakukan upaya hukum.

Sebagai buku panduan, buku ini dilengkapi dengan pengertian pokok bahasan untuk landasan berpijak, contoh-contoh kasus hukum yang relevan, dan pelbagai konvensi internasional sebagai acuan. Sebagai buku hukum, buku ini membahas hukum materiil dan hukum formil sekaligus. Misalnya, bagaimana mengadakan pelanggaran oleh polisi, jaksa, hakim, advokat, atau dokter. Bagaimana mengurus utang-piutang, mengajukan ijin pendirian bangunan, atau pembagian waris.

Selain itu, buku ini juga berisi bagian paling mendasar soal apa itu hukum, sejarah dan menyangkut sistemnya di Indonesia yang ditempatkan pada bab-bab awal. Isinya uraian pergulatan sejarah sampai pada struktur ketatanegaraan Indonesia mutakhir.

Kelengkapan bab bahasan dalam buku ini jadi keunggulan tersendiri. Diharapkan dengan makin banyaknya bab, isu-isu hukum spesifik akan makin terakses, tak dilupakan, dan tak hanya baru dipelajari bila sedang berkasus. Dengan buku panduan ini, orang jadi sadar dan mampu memahami dan menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.

Pembahasan dalam buku *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* ini terdiri dari 16 Bab. Ingin tahu lebih banyak, klik setiap bab yang ada ini:

[Bab 1 Hukum di Indonesia](#)
[Bab 2 Sejarah Hukum di Indonesia](#)
[Bab 3 Memahami Sistem Hukum Indonesia](#)
[Bab 4 Panduan Bantuan Hukum di Indonesia](#)
[Bab 5 Pengaduan](#)
[Bab 6 Hukum Keluarga, Masalah Perempuan dan Anak](#)
[Bab 7 Kredit dan Masalah Keuangan](#)
[Bab 8 Hukum Tanah](#)
[Bab 9 Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan](#)
[Bab 10 Hukum Lingkungan](#)
[Bab 11 Hak Warga Negara dalam Hukum Acara Pidana](#)
[Bab 12 Hak-hak Konsumen](#)
[Bab 13 Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Korban](#)
[Bab 14 Hak Asasi Manusia Dalam Konsultasi](#)
[Bab 15 Pemerintahan dan Warga Negara](#)
[Bab 16 Melakukan Aksi](#)
Formulir Pembelian

Bab 1 "Hukum di Indonesia"

Berisi beragam pengertian hukum dilanjutkan dengan penjelasan aliran-aliran di dalamnya. Bab ini juga menerangkan soal sistem hukum, pembedaan, bagaimana hukum dibuat dan bagaimana ia beroperasi. Daftar isi bab ini:

- ✓ Apa itu Hukum? ■ *Asal Usul Istilah Hukum* ■ *Pengertian Hukum* ■ *Bentuk atau Pembedaan Hukum* ■ *Norma Hukum dan Norma-Norma Sosial Lainnya* ■ *Sistem Hukum*
- ✓ Bagaimana Hukum Dibuat dan Dilaksanakan? ■ *Proses Terbentuknya Hukum* ■ *Cara Hukum Beroperasi*

[Ke atas](#)

Bab 2 "Sejarah Hukum di Indonesia"

Menguraikan pembabakan perjalanan hukum di Indonesia sejak masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, pada awal kemerdekaan, zaman Orde Baru Soeharto sampai masa paska reformasi 1998. Daftar isi bab ini:

- ✓ Periode Kolonialisme ■ *Periode VOC* ■ *Periode Liberal Belanda* ■ *Periode Politik Etis Sampai Kolonialisme Jepang*
- ✓ Periode Revolusi Fisik Sampai Demokrasi Liberal ■ *Periode Revolusi Fisik* ■ *Periode Demokrasi Liberal*
- ✓ Periode Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru ■ *Periode Demokrasi Terpimpin* ■ *Periode Orde Baru*
- ✓ Periode Pasca Orde Baru (1998 – 2005)

[Ke atas](#)

Bab 3 "Memahami Sistem Hukum Indonesia"

Anatomi sistem hukum dan pemerintahan Indonesia yang dilengkapi dengan penjelasan soal peradilan, alternatif penyelesaian perkara, penjelasan soal profesi hukum, dan penelusuran dokumen hukum. Daftar isi bab ini:

- ✓ Sistem Hukum Indonesia ■ *Pengantar* ■ *Hukum Perdata* ■ *Hukum Pidana* ■ *Hukum Tata Negara*

- ✓ Sistem Pemerintahan ■ *Konstitusi Indonesia* ■ *Sistem Pemerintahan Indonesia* ■ *Lembaga Kepresidenan* ■ *Dewan Perwakilan Rakyat* ■ *Kekuasaan Yudkatif* ■ *Mahkamah Konstitusi*
- ✓ Tata Urutan Perundangan ■ *Proses Pembentukan Perundang-undangan* ■ *Siapa Yang Mengusulkan Undang-undang?* ■ *Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)* ■ *Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)*
- ✓ Sistem Peradilan ■ *Pengadilan Niaga* ■ *Peradilan Anak* ■ *Pengadilan HAM* ■ *Pengadilan Pajak* ■ *Pengadilan Perikanan* ■ *Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi*
- ✓ Bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa? ■ *Konsultasi* ■ *Negosiasi dan Perdamaian* ■ *Mediasi* ■ *Konsiliasi dan Perdamaian* ■ *Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase* ■ *Arbitrase*
- ✓ Apa Saja Profesi-Profesi Dalam Bidang Hukum? ■ *Hakim* ■ *Jaksa* ■ *Pengacara dan Advokat*
- ✓ Bagaimana Melakukan Penelusuran Terhadap Dokumen Hukum? ■ *Peraturan Perundang-undangan* ■ *Putusan Mahkamah Konstitusi* ■ *Putusan Pengadilan*
- ✓ Lampiran ■ *Proses Pembentukan UU: RUU Usul Presiden* ■ *Proses Pembentukan UU: RUU Usul DPR* ■ *Proses Pembentukan UU: RUU Usul DPD*

[Ke atas](#)

Bab 4 “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia”

Sebagai warga negara, kita dapat menemukan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum di pelbagai undang-undang dan ketentuan konstitusi. Bagaimana teknis mendapatkannya serta bagaimana pula peran advokat dalam bantuan bantuan hukum ini. Daftar isi bab ini:

- ✓ Jaminan Hukum Bagi Bantuan Hukum (*Legal Aid*) ■ *Hak-hak Hukum Warganegara*
- ✓ Fungsi Advokat Dalam Bantuan Hukum
- ✓ Bagaimana Mempersiapkan Perkara Atau Menghadapi Perkara? ■ *Bagaimana Mempersiapkan Perkara?* ■ *Bagaimana Memberikan Kuasa?* ■ *Bagaimana Memberikan Kuasa di Depan Pengadilan?*
- ✓ Mendapatkan Bantuan Hukum ■ *UU Advokat Yang Berkaitan Dengan Bantuan Hukum* ■ *Penegakan Kode Etik Advokat* ■ *Komisi Pengawas Advokat* ■ *Etika Profesi Advokat* ■ *Prosedur Pemeriksaan dan Persidangan di DKAI* ■ *Bagaimana Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma?*

[Ke atas](#)

Bab 5 “Pengaduan”

Mengupas perbedaan pokok antara pengaduan dan laporan, berikut alur teknis mengadukan pelanggaran hukum yang dilakukan petugas pelayan publik macam aparat pemerintah, hakim, jaksa, notaris, advokat, dokter atau tentara sekalipun. Daftar isi bab ini:

- ✓ Pengantar ■ *Definisi Pengaduan atau Laporan* ■ *Siapa pihak berhak mengadu atau melapor* ■ *Siapa dan dalam hal apa pengaduan atau laporan dapat dilakukan ?* ■
- ✓ Bagaimana Mengadukan Pelanggaran Oleh Pejabat Pemerintah? ■ *Asas-Asas Pejabat/Aparat Pemerintah* ■ *Tata Cara Mengadukan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintah* ■
- ✓ Bagaimana Mengadukan Pelanggaran Oleh Hakim? ■ *Kode Etik Kehormatan Hakim* ■ *Komisi Yudisial: Fungsi dan Wewenangnya* ■ *Tata Cara Pengaduan dan Proses Pemeriksaan terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Hakim* ■

- ✓ Bagaimana Mengadukan Pelanggaran Oleh Jaksa? ■ *Etika Profesi Jaksa ■ Tata Cara Pengaduan dan Proses Pemeriksaan terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Jaksa* ■
- ✓ Bagaimana Mengadukan Pelanggaran Oleh Polisi? ■ *Bentuk-bentuk Pelanggaran Oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia ■ Tata Cara Pengaduan dan Proses Pemeriksaan terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian* ■
- ✓ Bagaimana Mengadukan Pelanggaran Oleh Advokat/Pengacara? ■ *Bentuk-bentuk Pelanggaran Oleh Advokat/Pengacara ■ Tata Cara Pengaduan dan Proses Pemeriksaan terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Advokat* ■
- ✓ Bagaimana Mengadukan Pelanggaran Oleh Notaris? ■ *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Oleh Notaris ■ Tata Cara Pengaduan dan Proses Pemeriksaan terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Notaris* ■
- ✓ Bagaimana Mengadukan Pelanggaran Oleh Dokter/Tenaga Medis? ■ *Fungsi dan Etika Profesi Dokter dan Tenaga Medis ■ Bentuk-bentuk Pelanggaran Oleh Dokter/Tenaga Medis ■ Tata Cara Pengaduan dan Proses Pemeriksaan terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Dokter/ Tenaga Medis* ■
- ✓ Bagaimana Mengadukan Pelanggaran Oleh Tentara Nasional Indonesia? ■ *Kode Etik Profesi Tentara Nasional Indonesia ■ Tata Cara Pengaduan dan Proses Pemeriksaan terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia* ■

[Ke atas](#)

Bab 6 “Hukum Keluarga, Masalah Perempuan dan Anak”

Menjelaskan aspek khusus hukum keluarga, dari soal syarat perkawinan, kawin beda agama, proses cerai, hingga hukum waris. Disambung uraian masalah anak, prosedur pengajuan hak asuh dan pengangkatan (adopsi). Diakhiri pembahasan soal tipe kekerasan perempuan, hak-haknya dalam catatan sipil serta bagaimana mendapatkan bantuan hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak yang kian marak belakangan. Daftar isi bab ini:

- ✓ Hukum Keluarga ■ *Pengantar ■ Apa Yang Dimaksud Perkawinan Antar Agama? ■ Apa Yang Dimaksud Perkawinan Campuran? ■ Apa Yang Dimaksud Perkawinan Di Bawah Tangan?*
- ✓ Putusnya Perkawinan ■ *Alasan Perceraian ■ Apa Saja Hak-hak Perempuan Dalam Perceraian? ■ Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengajuan Perceraian*
- ✓ Catatan Sipil ■ *Apa Saja Hak Perempuan Di Dalam Catatan Sipil? ■ Apa Saja Hak Anak Di Dalam Catatan Sipil? ■ Bagaimana Membuat Akta Kelahiran? ■ Rancangan Undang-Undang Catatan Sipil*
- ✓ Imigrasi ■ *Permohonan Paspor ■ Izin Keimigrasian*
- ✓ Kewarganegaraan ■ *RUU Kewarganegaraan*
- ✓ Hukum Waris ■ *Apa Yang Dimaksud Dengan Hukum Waris? ■ Apa Yang Dimaksud Dengan Hibah dan Wasiat? ■ Kapan Warisan Dibuka? ■ Lembaga Penyelesaian Sengketa Waris*
- ✓ Perempuan ■ *Apa Saja Hak Akses Ekonomi Perempuan? ■ Kepastian Akses Ekonomi Perempuan ■ Hak Ekonomi Perempuan*
- ✓ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ■ *Apa Saja Bentuk dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga? ■ Siapa Saja Yang Dapat Mendampingi Korban? ■ Bagaimana Proses Pelaporan? ■ Perlindungan Terhadap Korban KDRT ■ Bagaimana Cara Mengajukan Permohonan Surat Penetapan Perintah Perlindungan? ■ Prosedur Hukum*

- ✓ Perdagangan Perempuan dan Anak ■ *Bagaimana Terjadinya Perdagangan Perempuan?* ■
- ✓ Kondisi dan Praktek Perdagangan Perempuan dan Anak ■ *Perdagangan Perempuan dan Pengedaran Narkotika ■ Bagaimana Memperoleh Bantuan Hukum Bagi Korban Perdagangan Perempuan?*
- ✓ Anak ■ *Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak ■ Apa Saja Tanggungjawab Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak? ■ Bagaimana Prosedur Pengajuan Pengangkatan dan Pemeliharaan Anak? ■ Bagaimana Melakukan Pengangkatan/Adopsi Anak? ■ Apa Syarat-Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak (Adopsi)? ■ Bagaimana Melakukan Prosedur Pengajuan? ■ Anak Sebagai Korban Kekerasan ■ Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ■ Syarat-Syarat Anak Dapat Diajukan Ke Sidang Anak ■ Proses Hukum dan Persidangan Anak ■ Upaya Hukum*

[Ke atas](#)

Bab 7 “Kredit dan Masalah Keuangan”

Bab ini berisi aspek-aspek penting yang perlu diketahui masyarakat perihal kredit dan masalah keuangan, jaminan kredit, pembiayaan selain kredit, dan utang-piutang. Dilengkapi pula cara menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah. Daftar isi bab ini:

- ✓ Aspek-Aspek Yang Perlu Diketahui Masyarakat Perihal Kredit dan Masalah Keuangan ■ *Apa Yang Dimaksud Dengan Pengertian Kredit? ■ Apa Saja Jenis-Jenis Kredit?*
- ✓ Apa Yang Dimaksud Dengan Perjanjian Kredit? ■ *Apa Saja Syarat Sahnya Perjanjian Kredit? ■ Siapa Saja Yang Dimaksud Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kredit? ■ Apa Saja Fungsi Perjanjian Kredit? ■ Apa Yang Dimaksud Bentuk Perjanjian Kredit? ■ Apa Saja Komposisi Perjanjian Kredit? ■ Kapan Berakhirnya Perjanjian Kredit? ■ Apa Itu Grosse Akta Pengakuan Utang?*
- ✓ Jaminan Kredit ■ *Jenis-Jenis Pengikatan Jaminan Kredit ■ Penanggungan Utang (Borgtocht) ■ Gadai ■ Fidusia ■ Hak Tanggungan ■ Cessie*
- ✓ Bagaimana Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah? ■ *Bagaimana Penyelamatan Kredit Bermasalah? ■ Bagaimana Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Lembaga Hukum?*
- ✓ Utang-Piutang

[Ke atas](#)

Bab 8 “Hukum Tanah”

Menguraikan jenis-jenis hak atas tanah, bagaimana mengurus sertifikat, klaim atas tanah, melakukan jual-beli, sewa-menyewa, sampai denganantisipasi resiko bila ada konflik di dalamnya. Bab ini ditutup dengan ulasan soal pengusuran paksa. Daftar isi bab ini:

- ✓ Jenis-jenis Hak Atas Tanah ■ *Hak Milik ■ Hak Guna Usaha (HGU) ■ Hak Guna Bangunan (HGB) ■ Hak Pakai ■ Hak Sewa ■ Hak Membuka Hutan ■ Hak Memungut Hasil Hutan ■ Hak-hak lain*

- ✓ Apa Yang Dimaksud Klaim Hak Atas Tanah dan Pengurusan Sertifikat? ■ *Klaim Hak Atas Tanah* ■ *Bagaimana Melakukan Pengurusan Sertifikat?* ■ *Adakah Kepemilikan Kolektif Hak Atas Tanah?*
- ✓ Bagaimana Melakukan Jual Beli Tanah dan Rumah ? ■ *Apa Saja Obyek Jual-Beli Tanah Dan Rumah?* ■ *Siapa Saja Subyek Jual-Beli Tanah dan Rumah?* ■ *Batalnya Jual-Beli Tanah/Rumah* ■ *Apa Saja Hak dan Kewajiban Jual Beli Tanah/Rumah?* ■ *Apa Resiko Dalam Jual-Beli?* ■ *Apa Ketentuan Lain Dalam Jual-Beli Tanah/Rumah?*
- ✓ Bagaimana Melakukan Sewa Menyewa Tanah dan Rumah ? ■ *Apa Saja Kewajiban Para Pihak?* ■ *Apa Resiko Perjanjian Sewa-Menyewa?* ■ *Apa Saja Gangguan Dari Pihak Ketiga ?*
- ✓ ■ *Apa Yang Dimaksud Mengulang Sewakan?* ■ *Jual Beli Tidak Memutuskan Sewa Menyewa*
- ✓ Nilai Harga Sewa ■ *Bagaimana Penyelesaian Perselisihan Sewa Rumah dan Tanah?*
- ✓ Pengusuran Paksa

[Ke atas](#)

Bab 9 “Hukum Perburuhan/ Ketenagakerjaan”

Bagian ini menjelaskan bermacam hak normatif buruh yang perlu dihormati dalam hubungan kerja. Menerangkan pula yang dimaksud kondisi kerja, hubungan kerja, bagaimana menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja, dan perlindungan tenaga kerja migran. Daftar isi bab ini:

- ✓ Apa Saja Hak-hak Normatif Buruh? ■ *Upah* ■ *Cuti dan Istirahat Kerja* ■ *Serikat Buruh* ■ *Mogok Kerja*
- ✓ Apa Saja Yang Dimaksud Kondisi Kerja? ■ *Waktu Kerja* ■ *Pembinaan Keahlian* ■ *Perlindungan Anak* ■ *Perlindungan terhadap Buruh Perempuan* ■ *Kecelakaan Kerja* ■ *Jaminan Sosial Tenaga Kerja* ■ *Jaminan Kecelakaan Kerja* ■ *Jaminan Kematian* ■ *Jaminan Hari Tua* ■ *Jaminan Pemeliharaan Kesehatan*
- ✓ Bagaimana Memahami Hubungan Kerja? ■ *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu* ■ *Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu* ■ *Penyedia Jasa Tenaga Kerja* ■ *Peraturan Perusahaan* ■ *Perjanjian Kerja Bersama (PKB)* ■ *Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)* ■ *Pesangon*
- ✓ Bagaimana Menyelesaikan Persoalan Perselisihan Perburuhan? ■ *Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Perburuhan* ■ *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No:2 Tahun 2004.*
- ✓ Bagaimana Perlindungan Untuk Buruh Migran/Tenaga Kerja Indonesia? ■ *Perlindungan Buruh Migran Berdasarkan Konvensi Tahun 1990* ■ *Perlindungan TKI Berdasarkan UU No 39/2004* ■ *Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia*

[Ke atas](#)

Bab 10“Hukum Lingkungan”

Awal-awal bab ini menerangkan pengertian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan bagaimana realitanya di Indonesia. Sejauhmana peran serta

masyarakat diakomodir dalam aturan, bagaimana penyelesaian kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Daftar isi bab ini:

- ✓ Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat ■ *Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Pada Tingkat Global* ■ *Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat di Indonesia*
- ✓ Peran Serta Masyarakat ■ *Dasar Hukum Peran Serta Masyarakat di Indonesia* ■ *Mekanisme Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang* ■ *Mekanisme Peran Serta Masyarakat Dalam AMDAL*
- ✓ Kasus Pencemaran dan Illegal Logging ■ *Masalah Polusi dan Pencemaran Lingkungan* ■ *Peraturan Yang Berkenaan Dengan Tindak Pidana* ■ *Sanksi Pidana Dalam UULH*
- ✓ Masalah Pembalakan Liar (Illegal Logging) ■ *Peraturan Yang Berkaitan Dengan Illegal Logging* ■ *Dampak Illegal Logging* ■ *Alur Penegakan Tindak Pidana Illegal Logging*
- ✓ Prosedur Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan ■ *di Luar Pengadilan* ■ *Melalui Pengadilan* ■ *Ketentuan Pidana dan Tindakan Tata Tertib* ■ *Hak Gugat Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan* ■ *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan*

[Ke atas](#)

Bab 11“Hak Warga Negara Dalam Hukum Acara Pidana”

Berisi penjelasan prinsip-prinsip peradilan yang *fair*, batasan proses penyelidikan dan penyidikan, dan proses praperadilan. Dijelaskan pula soal hak-hak tersangka selama proses persidangan, dan bagaimana dengan upaya hukumnya yang bisa ditempuh. Daftar isi bab ini:

- ✓ Prinsip Fair Trial
- ✓ Proses Penyelidikan dan Penyidikan ■ *Hak Tersangka Untuk Didampingi Penasehat Hukum* ■ *Apa Yang Dimaksud Dengan Penangkapan?* ■ *Bukti Permulaan yang Cukup* ■ *Apa yang dimaksud dengan Penahanan* ■ *Apa Yang Dimaksud Dengan Praperadilan*
- ✓ Apa yang Dimaksud Dengan Penangguhan Penahanan
- ✓ Apa yang Dimaksud Dengan Perubahan Status Tahanan
- ✓ Hak – Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Persidangan
- ✓ Apa yang Dimaksud Dengan Upaya Hukum ■ *Upaya Hukum Biasa* ■ *Upaya Hukum Luar Biasa* ■ *Upaya Grasi*

[Ke atas](#)

Bab 12“Hak-hak Konsumen”

Bab ini memberikan analisa soal pentingnya perlindungan konsumen, meliputi apa saja hak-haknya. Untuk memudahkannya, tulisan ini dilengkapi bentuk-bentuk pelanggaran hak konsumen yang seringkali tak disadari, dan bagaimana kiat-kiat penyelesaian masalahnya. Daftar isi bab ini:

- ✓ Mengapa Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Dibutuhkan? ■ *Seperti Apa Isi UUPK?* ■ *Ketentuan Umum* ■ *Konsumen* ■ *Pelaku Usaha* ■ *Barang*
- ✓ Jasa ■ *Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)*
- ✓ Apa Saja Hak-Hak Konsumen ? ■ *Hak Atas Kenyamanan, Keselamatan dan Keamanan*

- ✓ Hak Untuk Memilih ■ *Hak Atas Informasi* ■ *Hak Untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya*
- ✓ Hak Untuk Mendapatkan Advokasi ■ *Hak Untuk Mendapat Pendidikan* ■ *Hak Untuk Tidak Diperlakukan Secara Diskriminatif* ■ *Hak Untuk Mendapatkan Ganti Rugi* ■ *Hak Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan Lainnya*
- ✓ Potret pelanggaran hak-hak konsumen ■ *Konsumen Perumahan* ■ *Konsumen jasa ketenagalistrikan* ■ *Konsumen jasa Perbankan*
- ✓ Bagaimana Cara menggapai hak-hak Konsumen ? ■ *Bagaimana Melakukan Advokasi Melalui Instrumen Hukum Pidana?* ■ *Apa Yang Dimaksud Pidana UU Sektoral?*
- ✓ Bagaimana Bentuk Aksi Hukum? ■ *Laporan* ■ *Pengaduan* ■ *Praperadilan*
- ✓ Bagaimana Advokasi Melalui Instrumen Hukum Perdata? ■ *Apa Yang Dimaksud Konstruksi Hukum Dalam Instrumen Hukum Perdata?* ■ *Perbuatan Melawan Hukum (Onreccmatige Daad)* ■ *Wansprestasi/Cidera Janji Dalam Kasus Perumahan*
- ✓ Bagaimana Bentuk Aksi Hukum ? ■ *Somasi* ■ *Gugatan Perdata Konvensional* ■ *Gugatan Perdata Perwakilan Kelompok (Class Action)* ■ *Gugatan Legal Standing* ■ *Melalui Instrumen Hukum Administrasi/Peradilan Tata Usaha* ■ *Melalui Badan Penyelaian Sengketa Konsumen (BPSK)*
- ✓ Bagaimana Melakukan Advokasi Melalui Instrumen Hukum Alternatif?
- ✓ Komisi Ombudsman Nasional ■ *Komisi Periklanan Indonesia* ■ *Peradilan Profesi* ■ *Asosiasi Organisasi Pengembang*

[Ke atas](#)

Bab 13“Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Korban”

Menjelaskan pengertian pelanggaran berat hak asasi manusia, bagaimana peran Komnas HAM dalam penyelidikan, bagaimana memintanya untuk menindaklanjuti penyidikan, apa peran komisi kebenaran dan rekonsiliasi, dan pengadilan hak asasi manusia. Daftar isi bab ini:

- ✓ Apa itu pelanggaran Berat HAM?
- ✓ Apa yang bisa dilakukan bila ada Pelanggaran Berat HAM? ■ *Lalu apa itu laporan atau pengaduan?* ■ *Apa yang perlu diperhatikan saat meminta Komnas HAM menyelidik?*
- ✓ Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Berat HAM ■ *Bagaimana bila penyelidikan selesai?* ■ *Bagaimana memulai penyidikan?* ■ *Pelengkapi kekurangan tersebut* ■ *Apa yang disebut dengan “kurang lengkap”?* ■ *Apakah penyidikan juga bisa melibatkan unsur masyarakat?* ■ *Apakah ada syarat khusus menjadi penyidik ad hoc?* ■ *Apakah ada batas waktu untuk penyidikan?* ■ *Bagaimana jika korban - keluarganya menolak penghentian penyidikan?* ■ *Bagaimana bila penyidikan selesai?*
- ✓ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Pengadilan HAM ■ *Bagaimana dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi?* ■ *Apa Beda Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi?* ■ *Dimanakah Letak Hubungan antara Pengadilan HAM dan KKR?*
- ✓ ■ *Bagaimana bila ingin tahu lebih jauh?*

- ✓ Apa Saja Prinsip-Prinsip Hak Korban? ■ *Hak Untuk Mengetahui* ■ *Hak Atas Keadilan* ■ *Hak Korban atas Pemulihan (Reparasi)*

[Ke atas](#)

Bab 14“Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi”

Menguraikan alasan pentingnya hak asasi manusia dijamin dalam konstitusi negara, dilanjutkan dengan deskripsi pelbagai macam hak asasi yang dijamin di dalamnya, mulai hak atas kesehatan, perumahan, pendidikan, informasi publik, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, persamaan kedudukan di muka hukum sampai hak masyarakat adat. Daftar isi bab ini:

- ✓ Mengapa Hak Asasi Manusia Penting Dalam Konstitusi?
- ✓ Hak-hak Asasi Dalam Konstitusi Indonesia ■ *Hak Atas Kesehatan* ■ *Hak Atas Perumahan* ■
- ✓ *Hak Atas Pendidikan* ■ *Hak Atas Informasi* ■ *Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Pemerintahan* ■ *Hak Atas Akses Pada Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum* ■ *Hak Masyarakat Adat*

[Ke atas](#)

Bab 15“Pemerintahan dan Warga Negara”

Di bagian awal tulisan ini menguraikan secara singkat tentang hukum tata negara dan administrasi. Dilanjutkan penjelasan singkat lembaga-lembaga negara independen yang muncul semenjak terjadinya perubahan kondisi sosio-politik yang berimplikasi pada struktur ketatanegaraan Indonesia. Daftar isi bab ini:

- ✓ Apa Yang Dimaksud Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara ?
- ✓ Lembaga Negara dan Komisi Negara
- ✓ Bagaimana Memahami Perkembangan Kelembagaan Negara?
- ✓ Bagaimana Melakukan Gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)?
- ✓ Mahkamah Agung (MA) ■ *Apa Saja Tugas dan Wewenang MA ?*
- ✓ Mahkamah Konstitusi (MK) ■ *Apa Saja Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)?*
- ✓ Kejaksaan ■ *Bagaimana Organisasi Kejaksaan Bekerja? ■ Apa Saja Tugas dan Wewenang Kejaksaan? ■ Apa Saja Tugas dan Wewenang Jaksa Agung?*
- ✓ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) ■ *Apa Saja Tugas dan Wewenang KPK?*
- ✓ Komisi Yudisial ■ *Apa Saja Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial?*
- ✓ Komisi Kejaksaan ■ *Apa Saja Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan? ■ Kapan Komisi Kejaksaan Dibentuk?*
- ✓ Komisi Kepolisian Nasional ■ *Apa Saja Tugas dan Wewenang Komisi Kepolisian?*
- ✓ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ■ *Apa Saja Fungsi Komnas HAM?*
- ✓ *Apa Saja Tugas dan Wewenang Komnas HAM ? ■ Bagaimana Melakukan Pengaduan dan Penanganan Kasus?*
- ✓ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ■ *Apa Saja Tugas dan Wewenang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi?*
- ✓ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) ■ *Apa Saja Fungsi dan Tujuan Komnas Perempuan?*

- ✓ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ■ *Apa Fungsi dan Tujuan Komisi Perlindungan Anak?*
- ✓ Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ■ *Apa Fungsi KPI?*
- ✓ *Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ■ Apa Saja Tugas dan Wewenang KPPU? ■ Bagaimana Prosedur atau Tata Cara Penanganan Laporan di KPPU?*
- ✓ Komisi Ombudsman Nasional (KON) ■ *Apa Saja Tugas dan Fungsi Komisi Ombudsman Nasional?*

[Ke atas](#)

Bab 16 “Melakukan Aksi”

Tulisan ini memberikan pedoman bagaimana melakukan aksi dalam konteks upaya hukum. Bagaimana mengajukan pengujian formil dan materiil UU terhadap UUD 1945, terhadap peraturan di bawah UU, melakukan gugatan perwakilan (*class action*), hak gugat organisasi (*legal standing*) atau gugatan warga negara (*citizen law suit*). Daftar isi bab ini:

- ✓ **Apa Yang Dimaksud Organisasi Secara Umum?** ■ *Apa Saja Prinsip-Prinsip Organisasi? ■ Bagaimana Merumuskan Tujuan Dengan Jelas? ■ Bagaimana Melakukan Pembagian Tugas Kerja? ■ Bagaimana Melakukan Koordinasi ? ■ Apa Saja Bentuk-Bentuk Organisasi? ■ Apa Yang Dimaksud Dengan Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil*
- ✓ **Aksi Hukum** ■ *Pengujian Formil dan Materil ■ Apa Pengertiannya? ■ Gugatan Perwakilan (Class Action)*
- ✓ **Aksi Komunitas** ■ *Sifat Aksi ■ Aksi yang Bersifat Politis ■ Aksi Yang Bersifat Sosial Ekonomis ■ Apa Saja Tingkatan Aksi? ■ Apa Saja Syarat-Syarat Aksi?*

[Ke atas](#)